

Presiden Jokowi akan Lantik KSAL Pengganti Yudo Margono Hari Ini

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) baru pengganti Laksamana Yudo Margono. Rencananya, pelantikan bakal digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini, Rabu (28/12).

Kendati demikian, siapa sosok pengganti Yudo Margono untuk menjabat KSAL belum juga diumumkan.

"KSAL Insyaallah besok (Rabu), pelantikannya besok," ujar Jokowi di Pasar Pujasera, Subang, Selasa (27/12).

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berharap KSAL yang baru segera ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Sebaliknya, Laksamana Yudo kini rangkap jabatan sebagai Panglima TNI dan KSAL.

"Mudah-mudahan KSAL yang baru segera ditetapkan dan dilantik karena begitu saya menjabat rangkap ini, tidak mudah. Dari Kotama

TNI AL laporan, Kotama TNI laporan semua, terus gimana ini? 'Hape'-nya pecah ini menerima laporan banyak sekali," kata Yudo, Kamis (21/12) lalu.

Oleh karena itu, dia berharap agar KSAL yang baru segera ditunjuk dan ditetapkan serta segera melakukan serah terima jabatan (ser'tjab).

"Dengan demikian, saya fokus bekerja sebagai Panglima TNI. Dengan posisi sekarang mungkin pembawa acara (MC) bingung, Panglima TNI selaku Kasal, gimana itu. Nanti bingung loh Panglima TNI selaku KSAL," ujar Yudo.

Yudo tidak menyebutkan siapa calon KSAL yang akan menggantikannya karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Bapak Presiden sudah bicara bahwa calon Kasal itu pati bintang tiga, bukan bintang satu atau bintang dua," kata Yudo. **han**

Panglima TNI dan Kapolri Terima Brevet Kopassus dan Baret Merah

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat penghargaan khusus dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Penghargaan itu berupa brevet Kopassus, baret merah, dan pisau komando.

Penyematan tersebut dipimpin oleh Danjen Kopassus Mayor Jenderal (TNI) Iwan Setiawan di Lapangan Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa

Brevet Kopassus itu disematkan oleh Iwan di dada kiri Yudo dan Listyo. Sementara pisau komando diletakkan di pinggang sebelah kiri.

"Ini menjadi kebanggaan saya di awal saya menjadi Panglima TNI," kata Yudo.

Rasa bangga juga diungkapkan Listyo. Menurutnya, penghargaan itu merupakan kehormatan besar bagi

dirinya. "Hari ini saya bersama Panglima TNI mendapatkan kehormatan besar untuk menjadi keluarga besar Kopassus," kata Listyo.

Dalam penyematan itu, Yudo dan Listyo di dampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Usai upacara, Yudo, Listyo, dan Dudung kemudian digendong dan diarak menuju ke depan Gedung Sarwo Edhie Wibowo di Mako Kopassus.

Di tempat ini ketiganya melakukan foto bareng dengan perwira tinggi TNI lainnya seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmad Heri Purnowo. **han**



PENYAMPAIAN CATATAN AKHIR DAN AWAL TAHUN KSP

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan pengantar dalam acara Catatan Akhir dan Awal Tahun Kantor Staf Presiden (KSP) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (27/12). KSP menyampaikan laporan kinerja 2022 dan target kerja 2023 dalam acara catatan akhir dan awal tahun yang mengangkat tema Siap Mengawal.

Sepanggung dengan Prabowo Subianto, Cak Nun: Prajurit Tak Pernah Pensiun

MOJOKERTO (IM) - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto satu panggung bersama Emha Ainun Nadjib yang kerap dipanggil Cak Nun di Ponpes Segoro Agung Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Senin (26/12) malam dalam acara "Sinaw Bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng".

Di acara tersebut, Cak Nun menegaskan bahwa seorang prajurit tak pernah pensiun dalam berjuang untuk negeri ini.

Sementara, Prabowo mengatakan rakyat Indonesia tangguh dan setia pada NKRI. Untuk itu, ia berharap masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta perdamaian.

"Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun dan bersatu," kata Prabowo. Prabowo dan Cak Nun pun sempat bernyanyi beberapa lagu bersama para jamaah. Mulai dari lagu Gethuk yang dipopulerkan oleh penyanyi campursari Waljinah, Kasih Ibu, dan Ruang Rindu dari Letto.

Cak Nun pun meminta Prabowo menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar.

"Kopassus dulu. Sekarang sudah pensiun. Purnawirawan," ujar Prabowo sambil tertawa.

Cak Nun pun menimpali, "Prajurit tidak pernah pensiun. Untuk negeri kita semua hidup prajurit itu berjuang," ujar Mbah Nun.

Usai acara, Prabowo memberikan apresiasi kepada pedagang asongan yang ada di acara tersebut. Ia menanggalkan jam tangan, kopiah dan baju safari yang ia kenakan dan diberikannya kepada pedagang lumpia, tahu, dan minuman.

Prabowo pun kembali dari panggung tersebut mengenalkan kaos dan lanjut menyalami masyarakat yang menunggunya di area luar acara. **mei**

2 Polhukum

FOTO: ANTARA



RAPAT KOORDINASI MENKO PMK

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (tengah) bersama Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) dan Menteri RB Abdullah Azwar Anas (kanan) berbincang usai Rapat Tingkat Menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/12). Rapat Tingkat Menteri itu membahas Penyusunan Perpres tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan.

Ketua KPK Firl Bahuri Perintahkan Jajarannya Tidak Ragu Lakukan OTT

Firl Bahuri menegaskan KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kekuasaan manapun dan tidak tunduk kepada siapapun.

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firl Bahuri perintahkan jajarannya tidak ragu menindak tegas koruptor,

termasuk dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Ia pun mengingatkan bahwa kerja-kerja KPK di masa mendatang akan semakin berat.

"Jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi termasuk tindakan tangkap tangan (OTT)," kata Firl saat memberikan sambutan Hari Bhakti ke-20 KPK di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Firl mengatakan, KPK merupakan lembaga negara yang berada di rumpun eksekutif.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK tidak diintervensi kekuasaan dan tidak tunduk pada pihak manapun. Ia meminta peringatan Hari Bhakti Ke-20 KPK menjadi momentum memberantas korupsi bersama pemerintah pusat, daerah, elemen masyarakat, dan lainnya.

"(KPK) dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun dan KPK tidak tunduk kepada siapapun," ujar Firl.

Sebagai informasi, dalam 20 tahun terakhir, setelah KPK didirikan pada 2002, KPK telah melakukan 1.507 perkara penyidikan, 1.350 perkara penindakan, 1.035 penuntutan, 902 perkara inkracht, 943 eksekusi, dan menetapkan 1.519 orang tersangka korupsi.

Data tersebut merujuk pada data penegakan hukum per 2004 hingga 2022. Selain itu, pada sejak 2014 hingga 15 Desember 2022, KPK telah berhasil melakukan *asset recovery* atau memulihkan aset sebesar Rp 3.327.502.341.305.

Jumlah tersebut terdiri dari denda Rp 143.530.744.267; uang pengganti Rp 706.360.835.225; dan harta rampasan senilai Rp 2.477.610.761.813.

Sebelumnya, OTT yang dilakukan KPK sempat ramai dibicarakan setelah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa OTT membuat citra negara menjadi buruk.

Luhut mengaku yakin digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat OTT tin-

tidak pidana korupsi tidak lagi terjadi. Sebab, tidak ada lagi celah untuk korupsi. Luhut mengungkapkan sejumlah keuntungan dari penerapan digitalisasi di sektor pelabuhan hingga transaksi melalui aplikasi E Katalog.

Aplikasi ini dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurutnya, aplikasi tersebut berhasil memuat 2,3 juta item dengan nilai Rp 1.600 triliun. Jumlah itu setara 105 miliar dolar Amerika Serikat. Luhut lantas menyebut aspek itu menjadi tempat korupsi. Namun demikian, dalam jumlah transaksi sebesar itu tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan jika pemerintah menerapkan digitalisasi.

"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Bahkan Luhut meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Menurutnya, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," ujar Luhut.

"Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main," katanya. **han**

KPU Ingatkan Mobil Dinas ASN Hingga TNI-Polri Tak Dipakai Kampanye Pemilu

JAKARTA (IM) - Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan netralitas ASN menjadi salah satu pelanggaran yang kerap terjadi di masa pemilu.

Afif mengambil contoh pelanggaran yang dilakukan ASN adalah penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas dipakai untuk kampanye.

Afif menyampaikan hal itu saat webinar sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024 melalui zoom, pada Selasa (27/12). Afif mengatakan kendaraan dinas baik ASN, TNI-Polri tak boleh digunakan untuk kampanye pemilu.

"Terhadap pelanggaran netralitas ASN, ini juga penting, TNI/Polri, Kepala Desa dan penggunaan fasilitas negara. Kadang-kadang di masa kampanye, masa pendaftaran memakai mobil-mobil dinas dan seterusnya, ini harus kita antisipasi," ujar Afif.

Kemudian, Afif membeberkan persoalan politik uang yang kini telah dimodifikasi dengan berbagai cara. Dia menilai perlunya diantisipasi potensi-potensi yang memunculkan politik uang.

"Ini penting (politik materi), materi lainnya, pengalaman kami di pemilu sebelumnya, misalnya model-model politik yang dengan cara memberi atau top-up atau mengisi ulang token listrik, itu juga sudah mulai muncul di Pemilu 2019 atau Pilkada kemarin, jadi potensi ini harus kita antisipasi," katanya.

"Inovasi para tim sukses, atau jajarannya untuk kemudian memodifikasi metode politik uang, yang sekarang ini sudah sangat canggih, banyaknya aplikasi dan seterusnya ini harus kita antisipasi, bisa jadi belum terlalu kita pikirkan," ujarnya.

Selain itu, pelanggaran lain kata Afif yakni politisasi sara. Dia menilai hal ini berbahaya pada tahapan pemilu. Afif menyebutkan politisasi sara, politik identitas, hoax dan ujaran kebencian merupakan hal-hal yang kerap terjadi pada saat kampanye.

"Ini satu tautan ikat de-

ngan isu-isu di kampanye biasanya, yang dilakukan oleh para pihak, kadang-kadang menggunakan isu ini dianggap paling mudah, akan berbahaya kalau politisasi sara dibungkus dengan percepatan ruang-ruang media sosial, mensosialisasikan tanpa ada klarifikasi dari para pihak penerima," paparnya.

Afif menyebutkan pada pemilu 2019, bukan hanya masyarakat biasa yang sering terjebak pada hoax, tetapi juga masyarakat yang bergelar tinggi. Oleh sebab itu, Afif mengatakan perlu adanya antisipasi dengan pendidikan pemilu.

"Di 2019 jangankan masyarakat biasa, orang-orang bergelar tinggi, sering kali langsung *mem-forward* seakan-akan informasi itu benar, ini tugas kita semua, percepatan pendidikan pemilih, pemberian informasi ini jadi sangat penting untuk kita semua, untuk kemudian kita maksimalkan," katanya. **mei**



SIDANG LANJUTAN KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas Elwi Danil (tengah) menyalami terdakwa Putri Candrawathi (kanan) dan Ferdy Sambo (kiri) usai memberikan keterangan saat menjadi saksi meringankan bagi kedua terdakwa pada sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (27/12). Sidang beragenda mendengarkan keterangan saksi meringankan yang dihadirkan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas Elwi Danil.

KEHILANGAN	KEHILANGAN	KEHILANGAN
SERTIFIKAT SHMASRS No. 20/V/L/Kuningan Timur Gd. Graha Irama Lantai 6A-B Jl. H.R. Rasuna Said Komplek Kuningan Timur Blok X/1 Kav. No.1 dan No. 2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Atas Nama Perseroan Terbatas TRI NUR CAKRAWALA Berkedudukan di Jakarta. Hilang di sekitar Jl. Taman Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Pada Hari Minggu Tanggal 14 Februari Tahun 2010.	SERTIFIKAT SHMASRS No. 138/XIII/Menteng Dalam Rusun Hunian Apartemen Casablanca 1.14.03 Lantai 14, Blok I Jl. Casablanca RT. 02/05 Kav. 12, Menteng Dalam Jakarta. Atas Nama Perseroan Terbatas TRI NUR CAKRAWALA Berkedudukan di Jakarta. Hilang di sekitar Jl. Taman Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Pada Hari Minggu Tanggal 14 Februari Tahun 2010.	SERTIFIKAT SHMASRS No. 157/XV-XVII/Menteng Dalam Rusun Hunian Apartemen Casablanca 1.16.01 Lantai 16, Blok I Jl. Casablanca RT. 02/05 Kav. 12, Menteng Dalam Jakarta. Atas Nama Perseroan Terbatas TRI NUR CAKRAWALA Berkedudukan di Jakarta. Hilang di sekitar Jl. Taman Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Pada Hari Minggu Tanggal 14 Februari Tahun 2010.
Jakarta, 28 Desember 2022 Direksi PT. TRI NUR CAKRAWALA	Jakarta, 28 Desember 2022 Direksi PT. TRI NUR CAKRAWALA	Jakarta, 28 Desember 2022 Direksi PT. TRI NUR CAKRAWALA

Terpilih Menjadi Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Punya Harta Rp200 Miliar

JAKARTA (IM) - Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim, terpilih menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), setelah menyisihkan 2 kandidat lain dalam proses seleksi terbuka yang digelar oleh Kemenkumham.

Silmy Karim unggul dari 2 kandidat lainnya yakni Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto, dan Purnawirawan TNI AU sekalogis Kalalibung Kementerian Pertahanan, Julexi Tambayong.

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Silmy tercatat mempunyai kekayaan sebesar Rp 208.898.010.645. Dia tercatat terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2021.

Dalam data LHKPN itu disebutkan harta terbesar Silmy berupa 16 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan senilai Rp 145.011.038.000.

Selain itu Silmy juga tercatat mempunyai 4 mobil dan 2 sepeda motor Harley Davidson dengan nilai Rp 2.975.000.000. Mobil milik Silmy yang tercatat dalam LHKPN adalah Jeep CJ7 (1988), Mercedes Benz 280E (1979), Toyota Land Cruiser (1981), Jeep Wrangler (1996), dan Land Rover Range Rover (1996).

Silmy juga tercatat mempunyai harta bergerak sebesar Rp 7.200.000.000, dan surat berharga senilai Rp 9.502.667.700. Selain itu, Silmy juga tercatat mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp 53.213.854.196, serta utang sebanyak Rp 9.004.549.251.

Kandidat terbaik

Penunjukan Silmy berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi, Andap Budhi Revianto menyampaikan, penunjukan Silmy Karim telah melalui proses seleksi yang terdiri dari berbagai tahapan.

"Silmy Karim terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi terbuka Dirjen Imigrasi mulai dari sejak proses administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang dan bangunan di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan senilai Rp 145.011.038.000.

Selain itu Silmy juga tercatat mempunyai 4 mobil dan 2 sepeda motor Harley Davidson dengan nilai Rp 2.975.000.000. Mobil milik Silmy yang tercatat dalam LHKPN adalah Jeep CJ7 (1988), Mercedes Benz 280E (1979), Toyota Land Cruiser (1981), Jeep Wrangler (1996), dan Land Rover Range Rover (1996).

Penilaian dilakukan oleh pansel yang terdiri dari berbagai stakeholder seperti dari internal Kemenkumham, Kementerian PAN-RB, dan Lembaga Administrasi Negara. **mei**